



Budaya Politik Transaksional dan Tantangan Partisipasi Publik Dalam Demokrasi Indonesia Era Digital

Rahsyia Auliya¹, Rifki Al Ahsa², Royan Zulkarnaen³, Wasis Amad Dhani⁴ Rudi Santoso⁵

¹Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung

*Penulis Korespondensi: aulyarahsyia6@gmail.com , alabsarifki@gmail.com ,
royanzulkarnain971@gmail.com , wasisahmaddhany06@gmail.com , rudisantoso@radenintan.ac.id

Abstract. *This article examines the persistence of transactional political culture and its implications for public participation in Indonesia's digital-era democracy. The background of this study lies in the increasing integration of digital technology into political processes, which on one hand expands access to participation, but on the other hand creates new spaces for pragmatic and transactional practices. The objective of this research is to explore how transactional politics adapts within digital environments and how it influences the quality of civic engagement. This study employs a qualitative approach through literature review and descriptive analysis, focusing on recent political phenomena, digital campaigns, and patterns of voter behavior. The findings indicate that transactional politics has not diminished; instead, it has transformed into more subtle and technologically mediated forms, such as digital campaigning incentives, micro-targeted messaging, and online influence operations. While digital platforms potentially encourage broader participation, they also risk reinforcing superficial engagement driven by short-term incentives rather than substantive political awareness. The study also highlights structural challenges, including digital inequality, low political literacy, and the dominance of elite-controlled narratives. The implications suggest that strengthening democratic participation requires not only technological access but also critical awareness, ethical political communication, and institutional commitment to transparency. Without these, digital democracy may reproduce existing inequalities rather than resolve them.*

Keywords: *digital democracy; political participation; political transactions; public engagement; voter behavior*

Abstrak. Tulisan ini berangkat dari kenyataan bahwa praktik politik transaksional masih menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari dinamika demokrasi di Indonesia, bahkan ketika teknologi digital berkembang pesat. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang partisipasi publik yang lebih luas; namun di sisi lain, ia juga menyediakan medium baru bagi praktik-praktik pragmatis yang cenderung menukar dukungan politik dengan imbalan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana budaya politik transaksional bertransformasi dalam konteks digital, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kualitas partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur dan analisis deskriptif terhadap berbagai fenomena politik kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik transaksional tidak hilang, melainkan beradaptasi. Jika sebelumnya praktik ini tampak dalam bentuk yang kasat mata seperti politik uang, kini ia hadir dalam bentuk yang lebih halus, misalnya melalui insentif digital, mobilisasi opini di media sosial, atau strategi komunikasi yang dirancang untuk memengaruhi persepsi publik secara cepat. Partisipasi publik memang meningkat secara kuantitatif, tetapi belum tentu diikuti oleh kedalaman pemahaman politik. Banyak keterlibatan yang bersifat reaktif, emosional, dan jangka pendek. Selain itu, terdapat sejumlah hambatan yang memperumit situasi, seperti kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi politik digital, serta dominasi aktor-aktor tertentu dalam mengendalikan arus informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi digital tidak otomatis menghasilkan partisipasi yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama, baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat sipil, untuk membangun kesadaran kritis, memperkuat etika komunikasi politik, serta memastikan transparansi dalam proses demokrasi agar partisipasi publik tidak sekadar ramai, tetapi juga bermakna.

Kata kunci: demokrasi digital; partisipasi publik; perilaku pemilih; politik transaksional; ruang digital

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan demokrasi di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Di satu sisi, mekanisme demokrasi prosedural seperti pemilu telah berjalan secara rutin dan relatif stabil. Namun di sisi lain, kualitas praktik demokrasi masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, salah satunya adalah kuatnya budaya politik transaksional. Praktik ini umumnya ditandai dengan adanya pertukaran kepentingan jangka pendek antara aktor politik dan masyarakat, baik dalam bentuk materi, janji, maupun akses tertentu, yang kemudian memengaruhi pilihan politik warga (Isfironi et al., 2025).

Sejumlah kajian sebelumnya menegaskan bahwa politik transaksional bukan sekadar fenomena insidental, melainkan telah mengakar dalam struktur sosial dan budaya politik masyarakat. Kondisi ini sering dikaitkan dengan faktor ekonomi, rendahnya kepercayaan terhadap institusi politik, serta lemahnya pendidikan politik yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, partisipasi publik cenderung bersifat pragmatis, di mana keputusan politik tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional atau programatik, melainkan pada keuntungan langsung yang dapat diperoleh (Nurdin, 2023).

Memasuki era digital, lanskap politik mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kehadiran media sosial dan platform digital membuka ruang baru bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, mulai dari mengakses informasi, menyampaikan opini, hingga berpartisipasi dalam kampanye. Secara teoritis, kondisi ini seharusnya memperkuat kualitas demokrasi karena memperluas akses dan mempercepat arus informasi. Akan tetapi, realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan tersebut. Teknologi digital justru kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk mereproduksi praktik politik transaksional dalam bentuk yang lebih terselubung, seperti pemberian insentif berbasis digital, mobilisasi opini melalui buzzer, atau penyebaran informasi yang bersifat manipulatif (Rojikun & Hernaningsih, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara digitalisasi dan partisipasi politik, namun sebagian besar masih menempatkan teknologi sebagai faktor yang netral atau bahkan cenderung positif. Padahal, jika dilihat lebih kritis, ruang digital juga menyimpan potensi distorsi, terutama ketika dikendalikan oleh kepentingan tertentu.

Selain itu, isu kesenjangan akses teknologi dan rendahnya literasi digital juga menjadi faktor yang membatasi kualitas partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya celah kajian (gap) yang perlu diisi, khususnya dalam memahami bagaimana budaya politik transaksional beradaptasi dalam ekosistem digital dan bagaimana dampaknya terhadap partisipasi publik yang substantif.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena tidak hanya berupaya menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga mencoba membaca arah perubahan budaya politik di tengah arus digitalisasi. Kebaruan dari kajian ini terletak pada upaya mengaitkan praktik politik transaksional dengan transformasi ruang digital secara lebih kontekstual, sekaligus menilai implikasinya terhadap kualitas partisipasi publik dalam demokrasi Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk baru politik transaksional di era digital serta mengkaji tantangan yang dihadapi dalam membangun partisipasi publik yang lebih kritis, sadar, dan berorientasi jangka panjang.

2. KAJIAN TEORITIS

Budaya politik transaksional tidak bisa dilepaskan dari konsep dasar budaya politik itu sendiri. Dalam kajian ilmu politik, budaya politik dipahami sebagai pola sikap, nilai, dan orientasi masyarakat terhadap sistem politik. Budaya ini membentuk cara individu memandang kekuasaan, mengambil keputusan politik, serta berinteraksi dengan institusi negara. Ketika orientasi tersebut lebih menekankan pada keuntungan praktis dan jangka pendek, maka yang muncul adalah kecenderungan transaksional, yaitu relasi politik yang dibangun atas dasar pertukaran kepentingan, bukan pertimbangan ideologis atau programatik (Ali et al., 2024).

Politik transaksional sering dikaitkan dengan praktik klientelisme. Relasi klientelistik menggambarkan hubungan antara aktor politik dan masyarakat yang bersifat tidak setara, di mana dukungan politik diberikan sebagai imbalan atas manfaat tertentu. Pola ini biasanya berkembang dalam masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang belum merata serta kelembagaan politik yang belum sepenuhnya kuat. Dalam konteks tersebut, pilihan politik menjadi sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kedekatan

personal, bukan oleh evaluasi rasional terhadap kebijakan public (Sony Eko Adisaputro, 2020).

Selain itu, teori partisipasi politik juga menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Partisipasi politik pada dasarnya mencakup segala bentuk keterlibatan warga negara dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi yang ideal tidak hanya diukur dari tingkat keikutsertaan, tetapi juga dari kualitas keterlibatan itu sendiri. Partisipasi yang berkualitas ditandai oleh adanya kesadaran, pemahaman, serta orientasi pada kepentingan bersama. Namun dalam praktiknya, partisipasi sering kali bersifat semu atau simbolik, terutama ketika dipengaruhi oleh insentif material atau tekanan social (Nuraeni et al., 2025).

Perkembangan teknologi digital turut mengubah cara partisipasi politik dijalankan. Teori demokrasi digital melihat bahwa teknologi informasi dapat memperluas ruang partisipasi dengan memberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi dan sarana komunikasi politik. Media sosial, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat, mengkritik kebijakan, serta membangun jejaring politik secara lebih cepat dan luas. Akan tetapi, sejumlah kajian juga mengingatkan bahwa ruang digital tidak selalu netral. Ia dapat dimanfaatkan untuk membentuk opini secara manipulatif, memperkuat polarisasi, atau bahkan mereproduksi praktik-praktik politik yang tidak sehat, termasuk politik transaksional dalam bentuk baru (Zaputra & Mulyandini, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi tidak serta-merta menghapus praktik politik lama, melainkan justru mengubah bentuk dan cara kerjanya. Politik uang yang sebelumnya dilakukan secara langsung, kini dapat bergeser menjadi pemberian insentif melalui platform digital atau kampanye berbasis hadiah. Di sisi lain, keberadaan aktor-aktor seperti buzzer politik dan influencer juga memperlihatkan bagaimana opini publik dapat dikonstruksi secara sistematis untuk kepentingan tertentu. Hal ini menandakan bahwa teknologi digital tidak hanya menjadi alat partisipasi, tetapi juga arena kontestasi kepentingan (S. S. Putra, 2025).

Di Indonesia, sejumlah studi menyoroti bahwa tingkat partisipasi politik memang mengalami peningkatan, terutama di kalangan generasi muda yang aktif di ruang digital. Namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kedalaman pemahaman

politik. Literasi digital yang belum merata membuat sebagian masyarakat rentan terhadap informasi yang tidak akurat atau bersifat provokatif. Dalam situasi seperti ini, partisipasi politik berisiko menjadi reaktif dan emosional, bukan reflektif dan rasional.

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antara budaya politik transaksional dan partisipasi publik dalam era digital bersifat kompleks. Di satu sisi, teknologi membuka peluang bagi demokratisasi yang lebih luas. Namun di sisi lain, tanpa didukung oleh literasi politik yang memadai dan penguatan institusi, ruang digital justru dapat memperkuat pola-pola lama dalam bentuk yang lebih sulit dikenali. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa transformasi digital tidak otomatis meningkatkan kualitas demokrasi, melainkan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat dan aktor politik memanfaatkan ruang tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak sekadar mengukur gejala, tetapi berupaya memahami makna di balik praktik politik transaksional dan dinamika partisipasi publik di era digital. Dengan desain seperti ini, peneliti dapat membaca fenomena secara lebih kontekstual, termasuk melihat keterkaitan antara struktur sosial, perilaku politik, dan perkembangan teknologi (Heryana, 2020).

Objek dalam penelitian ini tidak berbentuk populasi dalam arti statistik, melainkan berupa fenomena sosial yang berkaitan dengan praktik politik transaksional dan partisipasi publik di Indonesia. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian terdahulu, serta berbagai dokumen yang relevan dengan topik kajian. Selain itu, data juga diperkaya dengan pengamatan terhadap dinamika politik di ruang digital, termasuk media sosial dan pemberitaan daring yang mencerminkan praktik politik kontemporer (Dinata, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi. Peneliti menelaah berbagai sumber tertulis untuk memperoleh pemahaman teoritis sekaligus gambaran empiris mengenai fenomena yang diteliti. Proses ini tidak hanya bersifat mengumpulkan informasi, tetapi juga melibatkan seleksi kritis terhadap sumber yang dianggap kredibel dan relevan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti

sendiri, yang berperan dalam menafsirkan data, menghubungkan konsep, serta menarik kesimpulan berdasarkan kerangka teoritis yang digunakan.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diorganisasi, diklasifikasi, dan diinterpretasikan untuk menemukan pola-pola tertentu. Proses analisis dilakukan secara bertahap, mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini, peneliti berusaha mengaitkan antara temuan empiris dengan konsep-konsep teoritis yang telah dibahas sebelumnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi yang berbeda guna memastikan konsistensi informasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat kesesuaian yang cukup tinggi, sehingga dapat dianggap valid sebagai dasar analisis. Sementara itu, reliabilitas dijaga melalui konsistensi dalam penggunaan kerangka analisis dan prosedur pengolahan data (Sugiyono, 2020).

Model penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat konseptual, dengan menempatkan budaya politik transaksional sebagai variabel yang memengaruhi kualitas partisipasi publik. Dalam model tersebut, perkembangan teknologi digital berperan sebagai variabel kontekstual yang dapat memperkuat atau justru mengubah bentuk hubungan antara keduanya. Secara sederhana, model ini menggambarkan bahwa semakin kuat praktik politik transaksional, maka kualitas partisipasi publik cenderung menurun, terutama jika tidak diimbangi dengan literasi digital dan kesadaran politik yang memadai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur dan pengamatan terhadap dinamika politik digital dalam rentang waktu 2019–2024, yaitu periode yang mencakup momentum politik penting seperti pemilu dan meningkatnya penggunaan media sosial dalam kampanye. Fokus kajian diarahkan pada konteks Indonesia secara umum, dengan perhatian khusus pada praktik-praktik politik yang muncul di ruang digital, seperti media sosial, platform berbagi video, dan portal berita daring. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap dengan menyeleksi sumber

yang relevan dan kredibel, kemudian dianalisis untuk menemukan pola yang berulang (Iriyani Astuti Arief, Indra Lestari, 2023).

Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya politik transaksional tidak mengalami penurunan, melainkan mengalami perubahan bentuk. Jika sebelumnya praktik ini lebih mudah dikenali melalui pemberian uang atau barang secara langsung, kini ia hadir dalam format yang lebih halus dan sering kali tidak disadari sebagai bentuk transaksi. Misalnya, pemberian insentif dalam bentuk pulsa, hadiah digital, atau akses tertentu kepada kelompok pendukung, serta penggunaan influencer atau buzzer untuk membangun opini publik yang menguntungkan pihak tertentu.

Untuk memperjelas temuan tersebut, berikut disajikan ringkasan bentuk transformasi politik transaksional di era digital:

Tabel 1. Perubahan Pola Politik Transaksional di Era Digital

| Bentuk Konvensional | Bentuk Digital | Karakteristik |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Politik uang langsung | Insentif digital (pulsa, e-wallet) | Lebih terselubung, sulit dilacak |
| Mobilisasi massa fisik | Kampanye media sosial | Jangkauan lebih luas dan cepat |
| Patronase lokal | Influencer/buzzer | Berbasis popularitas dan algoritma |
| Pertemuan tatap muka | Interaksi daring | Minim kontrol langsung |

Tabel 1 menunjukkan bahwa esensi praktik transaksional tetap sama, yaitu adanya pertukaran kepentingan, tetapi medianya berubah mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa digitalisasi tidak menghapus praktik lama, melainkan memodifikasinya agar lebih adaptif terhadap konteks baru. Dari sisi partisipasi publik, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, terutama dalam bentuk ekspresi politik di media sosial. Masyarakat lebih mudah menyampaikan pendapat, memberikan komentar, atau terlibat dalam diskusi

politik. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, kualitas partisipasi tersebut masih menjadi persoalan. Banyak keterlibatan yang bersifat spontan, emosional, dan tidak didukung oleh pemahaman yang memadai terhadap isu yang dibahas.

A. Karakteristik Budaya Politik Transaksional dalam Praktik Demokrasi di Indonesia

Budaya politik transaksional di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari proses panjang yang melibatkan faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan politik. Dalam praktiknya, pola ini terlihat dari cara relasi antara aktor politik dan masyarakat dibangun bukan atas dasar gagasan atau program, tetapi lebih pada pertukaran kepentingan yang bersifat praktis dan jangka pendek. Hubungan semacam ini membuat politik cenderung dipahami sebagai ruang “tukar-menukar” keuntungan, bukan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan Bersama (E. A. Putra et al., 2024).

Salah satu ciri yang paling menonjol adalah kuatnya orientasi pragmatis dalam perilaku politik. Banyak pemilih tidak lagi menempatkan visi, misi, atau kapasitas kandidat sebagai pertimbangan utama. Sebaliknya, keputusan politik sering kali dipengaruhi oleh manfaat langsung yang bisa dirasakan, baik dalam bentuk uang, bantuan barang, maupun janji akses tertentu. Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, pilihan semacam ini sering dianggap rasional oleh masyarakat, meskipun dalam jangka panjang justru melemahkan kualitas demokrasi itu sendiri.

Budaya politik transaksional juga ditandai oleh relasi yang bersifat personal dan tidak setara. Aktor politik kerap membangun kedekatan dengan kelompok masyarakat tertentu melalui pendekatan informal, seperti jaringan kekerabatan, tokoh lokal, atau perantara yang memiliki pengaruh di tingkat komunitas. Relasi ini sering kali berkembang menjadi hubungan patron-klien, di mana masyarakat memberikan dukungan politik sebagai balasan atas bantuan atau perlindungan yang diberikan. Pola ini membuat posisi masyarakat cenderung bergantung, sementara aktor politik memiliki kendali yang lebih besar dalam menentukan arah hubungan tersebut (M & Ridha, 2025).

Ciri lain yang cukup kentara adalah lemahnya orientasi programatik dalam kompetisi politik. Kampanye politik sering kali lebih menekankan pada citra,

popularitas, atau strategi mobilisasi massa, daripada menawarkan solusi konkret terhadap persoalan publik. Akibatnya, ruang diskusi publik menjadi dangkal dan kurang mendorong masyarakat untuk berpikir kritis. Politik kemudian lebih banyak diisi oleh simbol dan narasi yang mudah diterima, tetapi minim substansi.

Praktik politik transaksional juga menunjukkan fleksibilitas yang cukup tinggi. Ia mampu menyesuaikan diri dengan berbagai konteks, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam beberapa kasus, praktik ini bahkan dianggap sebagai sesuatu yang “wajar” atau bagian dari kebiasaan politik sehari-hari. Normalisasi semacam ini menjadi persoalan serius, karena membuat masyarakat tidak lagi melihat praktik tersebut sebagai penyimpangan, melainkan sebagai sesuatu yang lumrah (Rohmandar, 2025).

Menariknya, keberlanjutan budaya politik transaksional juga didukung oleh lemahnya penegakan aturan dan pengawasan. Meskipun secara formal terdapat regulasi yang melarang praktik seperti politik uang, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Hal ini membuka ruang bagi aktor politik untuk tetap menggunakan cara-cara transaksional tanpa konsekuensi yang berarti. Budaya politik transaksional di Indonesia memiliki karakter yang kompleks dan berlapis. Ia tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga terhubung dengan struktur sosial dan sistem politik yang lebih luas (Ridoi, 2024). Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi praktik ini tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan perubahan dalam cara masyarakat memaknai politik itu sendiri.

B. Transformasi Politik Transaksional dalam Konteks Era Digital

Praktik politik transaksional sebenarnya tidak hilang, tetapi justru berubah bentuk mengikuti cara orang berinteraksi di ruang digital. Dulu, transaksi politik cenderung terlihat jelas misalnya pemberian uang atau barang secara langsung menjelang pemilu. Sekarang, polanya lebih samar dan sering kali tidak langsung dikenali sebagai bentuk “transaksi”, karena sudah dibungkus dengan teknologi dan strategi komunikasi yang lebih rapi. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah pergeseran dari interaksi tatap muka ke interaksi berbasis platform digital (Supriadi

et al., 2025). Media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Facebook bukan hanya jadi sarana kampanye, tetapi juga ruang untuk membangun kedekatan semu dengan pemilih. Kandidat atau tim sukses bisa menjangkau audiens yang jauh lebih luas tanpa harus turun langsung ke lapangan. Namun di balik itu, ada strategi tertentu yang dimainkan, misalnya pemberian insentif digital seperti pulsa, saldo dompet elektronik, atau hadiah online sebagai cara untuk menarik simpati dan dukungan.

Munculnya peran buzzer dan influencer juga ikut mengubah cara kerja politik transaksional. Jika sebelumnya hubungan patron-klien terjadi secara langsung, sekarang hubungan itu bisa dimediasi oleh pihak ketiga yang memiliki pengaruh di media sosial. Buzzer, misalnya, dibayar untuk membentuk opini publik, memperkuat citra kandidat, atau bahkan menyerang lawan politik. Dalam konteks ini, transaksi tidak lagi terjadi antara kandidat dan pemilih secara langsung, tetapi melalui produksi narasi yang dikonsumsi oleh publik secara luas. Hal lain yang menarik adalah penggunaan data dan algoritma dalam strategi politik. Kampanye tidak lagi bersifat umum, tetapi bisa disesuaikan dengan karakteristik kelompok tertentu melalui teknik *micro-targeting*. Pesan politik dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan preferensi audiens, sehingga lebih mudah diterima. Di satu sisi, ini membuat komunikasi politik menjadi lebih efektif. Namun di sisi lain, hal ini juga membuka ruang manipulasi, karena informasi yang diterima publik bisa sangat selektif dan tidak selalu mencerminkan realitas yang utuh (Nurgiansah, 2021).

Transformasi ini juga membuat batas antara partisipasi dan manipulasi menjadi semakin tipis. Banyak aktivitas yang tampak seperti partisipasi misalnya membagikan konten politik, ikut dalam kampanye online, atau memberikan komentar padahal bisa saja didorong oleh insentif tertentu atau pengaruh yang tidak disadari. Akibatnya, keterlibatan publik terlihat tinggi secara angka, tetapi belum tentu mencerminkan kesadaran politik yang sebenarnya. Perlu diakui bahwa tidak semua perubahan ini bersifat *negative* (Disurya & Sardana, 2025). Teknologi digital juga membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih aktif dan kritis, terutama bagi kelompok muda yang sebelumnya kurang terlibat dalam politik. Informasi menjadi lebih mudah diakses, dan ruang diskusi menjadi lebih terbuka. Namun persoalannya, tidak semua

orang memiliki kemampuan yang sama untuk memilah informasi atau memahami dinamika yang terjadi di baliknya.

Transformasi politik transaksional di era digital bukan sekadar perubahan alat, tetapi juga perubahan cara kerja. Praktik yang dulu bersifat langsung kini menjadi lebih tersembunyi, lebih sistematis, dan dalam beberapa kasus lebih sulit diawasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak otomatis memperbaiki kualitas demokrasi. Justru tanpa pengawasan dan literasi yang memadai, teknologi bisa menjadi medium baru yang memperkuat praktik lama dalam bentuk yang lebih kompleks (Indriani, 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Budaya politik transaksional di Indonesia tidak mengalami kemunduran, melainkan bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital. Praktik yang sebelumnya tampak secara langsung kini hadir dalam bentuk yang lebih halus dan sulit dikenali, seperti melalui insentif digital, pengelolaan opini publik, hingga strategi komunikasi berbasis data. Kondisi ini berdampak pada kualitas partisipasi publik yang cenderung meningkat secara kuantitas, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan yang kritis dan berbasis pemahaman. Dengan kata lain, ruang digital memang membuka peluang partisipasi yang lebih luas, namun tidak secara otomatis memperkuat kualitas demokrasi jika tidak diiringi dengan literasi politik dan digital yang memadai.

Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada keberadaan teknologi, tetapi pada bagaimana teknologi tersebut digunakan dalam konteks sosial dan politik yang masih rentan terhadap praktik-praktik pragmatis. Kesenjangan akses, rendahnya kemampuan dalam memilah informasi, serta dominasi aktor tertentu dalam mengendalikan arus komunikasi menjadi faktor yang memperumit upaya membangun partisipasi publik yang lebih substantif. Oleh karena itu, penting untuk melihat demokrasi digital tidak semata sebagai kemajuan teknis, tetapi sebagai proses yang memerlukan kesiapan sosial dan budaya yang lebih luas.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk meningkatkan kualitas partisipasi publik. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat program literasi digital dan pendidikan politik yang tidak hanya bersifat

formal, tetapi juga kontekstual dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik politik di ruang digital juga menjadi hal yang mendesak, agar tidak terjadi penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan sempit. Masyarakat sendiri diharapkan dapat lebih kritis dalam menyikapi informasi serta tidak mudah terpengaruh oleh bentuk-bentuk transaksi yang terselubung.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika empiris di tingkat lapangan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan data primer, seperti wawancara atau survei, agar dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku politik masyarakat di era digital. Selain itu, kajian yang lebih spesifik pada kelompok tertentu, seperti generasi muda atau komunitas lokal, juga penting untuk dilakukan guna memahami variasi praktik dan tantangan yang ada secara lebih detail.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A., Dea Fenica, S., Noviyanti, S., Chan, F., Guru Sekolah Dasar, P., & Keguruan Dan, F. (2024). Peran Ilmu Pengetahuan Sosial Dalam Pendidikan Global The Role Of Social Science In Global Education. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3)(Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research), 1551–1560. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10676>
- Dinata, F. R. (2025). *Integrasi Metode Kualitatif dan Kuantitatif dalam Penelitian Manajemen Pendidikan Islam*. 1(2), 28–32.
- Disurya, R., & Sardana, L. (2025). *Adaptasi Kerangka Hukum Korporasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekosistem Startup di Indonesia Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang masif dalam mentransformasi secara fundamental berbagai aspek kehidupan , mulai dari pertumbuhan eksponensial , didorong oleh tingginya penetrasi internet yang*. 02(02), 134–150.
- Heryana, A. (2020). *Data dan Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*.
- Indriani, D. (2021). *Isu pemekaran wilayah sebagai komoditas politik dalam masyarakat to pulo di kabupaten selayar*. 1–23.
- Iriyani Astuti Arief , Indra Lestari, Y. S. (2023). *Kontestasi Wacana Politik Identitas Dalam Ruang Digital Menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara*. 6(4), 1311–1324.
- Isfironi, M., R, A. S., & Luthfy, R. M. (2025). *Budaya Politik & Demokrasi (Meruangkan Budaya Politik Unggul dan Menghidupkan Kembali Demokrasi Lokal)*. 04(1), 13–21.

- M, R. A. A., & Ridha, M. R. (2025). *Makna Simbolik dan Nilai-Nilai Budaya Dalam Ritual Mappacci pada Masyarakat Bugis Makassar*. 1, 97–105.
- Nuraeni, W., Sangadah, A., & Zaman, M. F. (2025). *Islam Politik di Turki : Kebangkitan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)*. 801–810.
- Nurdin. (2023). *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Demokrasi dan Otoritarian: Analisis Perbandingan Inggris dan Singapura*. 4, 140–167.
- Nurgiansah, T. H. (2021). *Pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan*. 2(2), 138–146.
- Putra, E. A., Khairiah, A. S., Rahman, A., Taskiyah, E., Aqmar, F. R., & Kamila, S. (2024). *Peran Media dalam Meningkatkan Komunikasi Antar Budaya Pemahaman*. 4, 1–10.
- Putra, S. S. (2025). *Dampak Digitalisasi Perbankan terhadap Transparansi dan Perataan Laba di Bank Umum Syariah Indonesia*. 5(3), 271–279.
- Ridoi, A. (2024). Resolusi Konflik dalam Piagam Madinah: Sebuah Perspektif Manajemen Konflik dalam Membangun Aturan Sosial. *Tanzhim: Jurnal Dakwah Terprogram*, 2(2), 361–384. <https://doi.org/10.55372/tanzhim.v2i2.30>
- Rohmandar, A. (2025). *Identifikasi Praktik Politik Kartel dan Kongkalikong di Indonesia : Analisis Komprehensif Terhadap Fenomena Oligarki Politik Kontemporer*. 02(01), 1990–1998.
- Rojikun, A., & Hernaningsih, F. (2022). *Membangun Kesadaran Moral & Etika Dalam Berinteraksi Di Era Digital Pada Remaja Karang Taruna RW 07 Rempoa Ciputat*. 4(1), 19–28.
- Sony Eko Adisaputro. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Milenial Membentuk Manusia Bermartabat. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1), 1–27. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v1i1.118>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Supriadi, D., Taufiqrrahman, & Samsuddin. (2025). Inovasi Pembelajaran Pai Di Era Digital: Strategi Menumbuhkan Minat Belajar Gen-Z. *Tadbriuna Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4, 319–334. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/tadbiruna/article/view/1506>
- Zaputra, A. R. R., & Mulyandini, V. C. (2023). Internal Audit Pada Perusahaan Yang Menerapkan Lingkungan Bisnis Digital. *Ekonomi: Jurnal Ekonomi ...*, 05(1), 23–34. <http://ejournal.uicm.ac.id/index.php/ekonam/article/view/546%0Ahttp://ejournal.uicm.ac.id/index.php/ekonam/article/download/546/310>